RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BANJIR DI KAWASAN JL. PERHUBUNGAN LAUT DENDANG, KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG

Siti Ansari Tambunan[1], Fadillah Tisali[2], Zianna Mira Simatung[3], Gresy Viarosa Saragih[4], Jamaludin[5], Sri Yunita [6]
[1,2,3,4,5,6,7]Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia
Email: sitiansaritbn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di kawasan Jalan Perhubungan, Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat dan penilaian masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani banjir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di kawasan Jalan Perhubungan dan mengalami secara langsung kondisi banjir. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tanggapan, sikap, dan tindakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir, faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat, serta penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan dan efektivitas kebijakan tersebut.

Kata Kunci*:* Respons Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Penanganan Banjir, Efektivitas Kebijakan.

Abstract

This study aims to determine the community's response to government policies in flood management in the Jalan Perhubungan area, Laut Dendang, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency. It also aims to identify the factors that influence community responses and to examine community perceptions of the effectiveness of government policies in addressing flooding. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The research informants were selected using purposive sampling, consisting of 10 street vendors in the Jalan Perhubungan area who directly experience flooding conditions. The data consist of primary and secondary data. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study is expected to provide an overview of the community's responses, attitudes, and actions toward government policies for flood management, the factors influencing these responses, and the community's assessment of the implementation and effectiveness of these policies.

Keywords*: Community Response, Government Policy, Flood Management, Policy Effectiveness.*

A. PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat, alih fungsi lahan, minimnya daerah resapan air, serta buruknya sistem drainase menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir di berbagai kota besar, sehingga bencana ini kerap berulang setiap kali musim hujan tiba dan menimbulkan kerugian material maupun non-material bagi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Sebagai respons atas persoalan tersebut, negara telah mengamanatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, yang melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat itu sendiri. Kebijakan mitigasi banjir yang efektif idealnya tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup strategi non-fisik seperti edukasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan pelibatan warga secara aktif dalam setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana (Utama et al., 2018)

Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, tidak luput dari persoalan banjir perkotaan ini. Curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Medan dan sekitarnya kerap menyebabkan luapan sungai serta genangan air di berbagai ruas jalan utama, seperti Jalan Brigjen Katamso, Jalan Sei Batang Hari, Jalan William Iskandar, kawasan Pancing, hingga pintu tol Letda Sujono, yang membuat arus lalu lintas lumpuh total dan aktivitas warga terganggu (Sumut Online, 2026).

Skala dampak banjir di Kota Medan tergolong signifikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara mencatat sekitar 1.948 jiwa terdampak dan 482 rumah warga terendam pada peristiwa banjir besar yang melanda Medan awal September 2026, dengan Kelurahan Sei Mati sebagai wilayah yang paling parah terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir di Medan bukan lagi persoalan insidental, melainkan telah menjadi ancaman berulang yang memengaruhi ribuan warga dalam satu kali kejadian saja (Sumut Online, 2026).

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menjalankan sejumlah langkah penanganan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyaluran bantuan rehabilitasi rumah bagi warga terdampak, hingga menindaklanjuti keluhan warga terkait banjir dan kerusakan jalan di tingkat kecamatan. Namun demikian, sejumlah pejabat daerah sendiri mengakui adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan, seperti normalisasi sungai yang tidak dilakukan dalam kurun waktu yang sangat lama (Portal Resmi Pemerintah Kota Medan, 2026).

Salah satu ruas jalan yang berulang kali terdampak adalah Jalan Perhubungan, jalur yang menghubungkan sejumlah desa dan kecamatan di kawasan Medan dan sekitarnya. Setiap kali hujan berintensitas tinggi turun, ruas jalan ini kerap terendam hingga setinggi betis orang dewasa di sepanjang kurang lebih satu kilometer, menyebabkan banyak kendaraan mogok dan memaksa pengendara mendorong kendaraannya agar dapat melintas. Sebagai jalur perhubungan yang vital, gangguan pada ruas jalan ini berdampak langsung pada mobilitas warga, kelancaran aktivitas ekonomi, serta akses menuju fasilitas-fasilitas publik di sekitarnya (detikSumut, 2025).

Persoalan berulangnya banjir ini erat kaitannya dengan dua hal yang saling berkaitan. Pertama, masih rendahnya kesiapsiagaan dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana banjir, sebagaimana ditemukan dalam suatu penelitian bahwa lebih dari separuh responden memiliki tingkat pengetahuan kesiapsiagaan yang tergolong kurang (Fatahillah & Rhomadhoni, 2022). Kedua, belum optimalnya upaya struktural seperti normalisasi sungai, yang terbukti secara model matematis mampu menurunkan tingkat risiko

banjir di suatu kawasan apabila dilaksanakan secara konsisten (Sukmajati, Kusuma, Hatmoko, Farid, & Natasaputra, 2022). Kesenjangan antara kebijakan yang telah dijalankan pemerintah dengan kondisi riil serta persepsi masyarakat yang merasakan langsung dampak banjir inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang. Partisipasi dan respons aktif masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan mitigasi bencana di tingkat lokal (Utama et al., 2020), sehingga kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah menjadi pedoman dalam menentukan langkah pencegahan, penanganan, dan pengurangan risiko bencana. Kebijakan tersebut perlu disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara terarah agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Abdul Latief Ruchban, Rudi Saprudin Darwis, 2024).

Dalam penanganan banjir, kebijakan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, penyediaan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Penanganan banjir tidak hanya berfokus pada tindakan setelah banjir terjadi, tetapi juga perlu dilakukan melalui upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko serta dampak banjir (Zulaeha et al., 2022).

Pelaksanaan kebijakan penanganan banjir juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. (Anugrah, 2023) menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam penanganan banjir mencakup perumusan kebijakan, pengembangan infrastruktur drainase, pemantauan kondisi, serta koordinasi lintas sektor. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Khusus di Kota Medan, implementasi kebijakan penanggulangan banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian (Edwin Fransiari et al., 2021) menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut memiliki hubungan dengan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya program pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dilaksanakan.

Selain itu, (Muhammad Ali Yusup, Hanny Purnamasari, 2022) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi wilayah yang terdampak banjir.

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan pemerintah dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai berbagai keputusan, program, dan tindakan pemerintah dalam mencegah serta menangani banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang. Kebijakan tersebut kemudian dilihat melalui respons dan penilaian masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan,

manfaat yang dirasakan, serta kemampuan kebijakan dalam mengurangi dampak dan frekuensi banjir.

2. Penanganan Banjir

Penanganan banjir merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur. Penanganan banjir tidak hanya dilakukan ketika banjir terjadi, tetapi juga melalui kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan saat kejadian, dan pemulihan setelah banjir. Dengan demikian, penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir. (Selvia & Angela, 2024) melalui kajian sistematis terhadap 124 artikel menjelaskan bahwa pengelolaan banjir perlu menggunakan kerangka yang holistik karena persoalan banjir berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk perubahan penggunaan lahan, kondisi hidrologi, klimatologi, mitigasi, dan evaluasi kejadian banjir.

Penanganan banjir pada dasarnya dapat dilakukan melalui upaya struktural dan nonstruktural. Upaya struktural berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, seperti saluran drainase, kolam retensi, tanggul, pompa, serta sarana pengendalian aliran air lainnya. Sementara itu, upaya nonstruktural dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, penyusunan kebijakan, sistem peringatan dini, pengaturan tata ruang, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan kebijakan dan keterlibatan masyarakat. (Selvia & Angela, 2024) menempatkan mitigasi banjir sebagai salah satu komponen penting dalam kerangka pengelolaan banjir secara menyeluruh.

Salah satu bagian penting dalam penanganan banjir di wilayah perkotaan adalah pengelolaan drainase. Drainase berfungsi mengalirkan dan mengendalikan air agar tidak menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Namun, keberadaan saluran drainase saja belum menjamin terbebasnya suatu wilayah dari banjir karena efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kondisi dan pemeliharaan saluran. (Dr. Deasy Arisanty et al., 2022) menemukan bahwa permasalahan drainase di kawasan perkotaan dapat berkaitan dengan sampah, sedimentasi, material bangunan, serta kurang optimalnya pengelolaan. Oleh karena itu, pemeliharaan drainase perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek yang penting dalam penanganan banjir karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak banjir. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran air, ikut dalam pemeliharaan drainase, melaporkan kondisi yang berpotensi menyebabkan banjir, serta mengikuti kegiatan sosialisasi dan kesiapsiagaan bencana. (Yarangga et al., 2023) menunjukkan bahwa strategi penanganan banjir berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui upaya mitigasi nonstruktural, terutama sosialisasi dan penyuluhan mengenai penanganan bencana banjir.

Selain masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam penanganan banjir, terutama dalam merumuskan kebijakan, menyediakan infrastruktur, melakukan pemeliharaan, memberikan informasi kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi antarinstansi. Penanganan banjir membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. (Yulianto Adi Setiawan & Nugara, 2022) menjelaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mengurangi risiko bencana.

Dalam konteks Kota Medan, penanganan banjir juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons permasalahan drainase dan pengaduan masyarakat. Sari dan Siahaan meneliti responsivitas penanganan drainase untuk penanggulangan banjir di Kota Medan dan melihat beberapa aspek, seperti pengaduan masyarakat, sikap aparatur dalam merespons pengaduan, pemanfaatan pengaduan sebagai bahan perbaikan pelayanan, serta tindakan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini relevan dengan penelitian mengenai respons masyarakat karena tanggapan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah untuk mengetahui apakah kebijakan dan pelayanan penanganan banjir telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penanganan banjir juga perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pencegahan dan pengurangan risiko banjir. Ilwandri dkk. (2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan drainase dapat dilakukan melalui edukasi, pelatihan pemeliharaan drainase, serta pembentukan kelompok masyarakat yang terlibat dalam menjaga fungsi drainase. Dengan adanya keterlibatan tersebut, masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik untuk ikut mengurangi risiko banjir di lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penanganan banjir dapat dipahami sebagai upaya terpadu yang melibatkan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, mitigasi, kesiapsiagaan, serta partisipasi masyarakat. Penanganan yang baik tidak hanya dinilai dari adanya program pemerintah, tetapi juga dari pelaksanaan program dan dampaknya terhadap kondisi masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep penanganan banjir digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi banjir di Jalan Perhubungan Kota Medan serta bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut. Dengan demikian, penanganan banjir menjadi landasan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah, pelaksanaan di lapangan, kendala yang dihadapi, dan respons masyarakat.

3. Respons Masyarakat

Respons masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang diberikan masyarakat terhadap suatu keadaan, kebijakan, program, maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Respons tersebut dapat muncul setelah masyarakat mengetahui dan memahami suatu kondisi, kemudian memberikan penilaian dan menentukan sikap terhadap kondisi tersebut. Oleh karena itu, respons masyarakat tidak hanya berupa pendapat, tetapi juga dapat terlihat melalui sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu kebijakan atau permasalahan (Village et al., 2018).

Respons masyarakat dapat dilihat melalui pengetahuan atau persepsi, sikap, dan tindakan masyarakat. Pengetahuan atau persepsi berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami suatu kebijakan atau permasalahan. Sikap berkaitan dengan penerimaan, dukungan, penolakan, maupun ketidakpedulian masyarakat. Sementara itu, tindakan menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menghadapi atau menanggapi suatu keadaan. (Village et al., 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur pengendali banjir menjadi salah satu hal penting untuk melihat bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap program pemerintah.

Persepsi masyarakat merupakan bagian penting dalam membentuk respons. Persepsi dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kondisi lingkungan, serta informasi yang diterima. Dalam konteks bencana banjir, masyarakat yang memiliki pengalaman menghadapi banjir dapat memiliki pemahaman tertentu mengenai penyebab, dampak, dan upaya penanganannya. Penelitian (Putri et al., 2024) menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi mengenai pentingnya peran

pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penanganan banjir, terutama dalam proses evakuasi, pemberian bantuan, dan koordinasi penanganan bencana.

Selain persepsi, sikap masyarakat juga menjadi bagian dari respons. Sikap menunjukkan kecenderungan masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan atau tindakan pemerintah. Masyarakat dapat memberikan sikap positif apabila kebijakan dianggap memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, sikap negatif dapat muncul apabila kebijakan dianggap kurang efektif atau tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. (Karlina & Ismanto, 2017) menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat terlihat dalam bentuk kepatuhan maupun sikap acuh tak acuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa cara masyarakat menilai dan menerima kebijakan dapat menghasilkan respons yang berbeda-beda.

Respons masyarakat juga dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau partisipasi. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam menghadapi permasalahan banjir, misalnya, masyarakat dapat melakukan berbagai tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air, mengikuti kegiatan penanggulangan banjir, memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan, maupun bekerja sama dengan pemerintah dalam mengurangi risiko banjir. Penelitian mengenai respons masyarakat di kawasan rawan banjir menunjukkan bahwa masyarakat melakukan berbagai strategi penanggulangan, baik sebelum maupun setelah terjadinya banjir (Suneth et al., 2020).

Respons masyarakat terhadap suatu kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, serta cara pelaksanaan suatu kebijakan. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami kebijakan dan akhirnya memberikan respons yang kurang positif. (Karlina & Ismanto, 2017) menunjukkan pentingnya komunikasi pemerintah dalam membentuk tingkat kepatuhan dan respons masyarakat terhadap kebijakan publik.

Dalam permasalahan banjir, respons masyarakat juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat dalam menghadapi dampak banjir. Banjir dapat menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan aktivitas, serta masalah sosial sehingga masyarakat akan melakukan berbagai bentuk penyesuaian dan penanganan. Penelitian (Setiadi et al., 2023) mengenai banjir di Kota Medan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan berbagai respons terhadap dampak banjir, termasuk adanya solidaritas masyarakat, tetapi penelitian tersebut juga menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam penanganan dan mitigasi banjir.

4. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak dapat dikatakan efektif hanya karena telah dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi perlu dilihat dari hasil yang diperoleh setelah kebijakan tersebut diterapkan. (Darman, 2021) dalam penelitiannya mengenai efektivitas kebijakan pemberlakuan kartu vaksin menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Aspek-aspek tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan permasalahan yang hendak diselesaikan serta kondisi kelompok sasaran.

Efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari kemampuan suatu kebijakan dalam menghasilkan perubahan atau manfaat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Penelitian (Pramumardani et al., 2024) mengenai evaluasi efektivitas kebijakan SNI wajib menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas kebijakan membutuhkan indikator yang dapat

menggambarkan hasil pelaksanaan kebijakan secara objektif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa indikator efektivitas dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai.

Selain pencapaian tujuan, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh proses implementasi kebijakan. (M Edwin Fransiari, Sony Priajaya Warouw, 2021) melalui kajian literatur sistematis mengenai efektivitas implementasi kebijakan publik di negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun hambatan dalam proses implementasinya. Sementara itu, penelitian mengenai hambatan implementasi kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas, lemahnya komunikasi dan koordinasi, struktur birokrasi, regulasi, serta faktor sosial budaya dapat menyebabkan efektivitas kebijakan belum tercapai secara optimal.

Efektivitas kebijakan pada akhirnya dapat dilihat dari kemampuan kebijakan dalam memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. (M Edwin Fransiari, Sony Priajaya Warouw, 2021), dalam penelitian mengenai efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana di Indonesia, menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, kapasitas lokal, dan pendekatan berbasis masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, efektivitas kebijakan dapat disimpulkan sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan hasil dan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, serta hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Penggunaan aspek-aspek tersebut dapat membantu peneliti mengetahui apakah kebijakan yang diteliti telah berjalan secara efektif atau masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaannya.

C. METODE

Menurut (Hikmawati, 2020) metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh biasanya berbentuk kata-kata, narasi, atau deskripsi, bukan angka-angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, serta lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat fleksibel, sehingga desain penelitian dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan temuan di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena mampu menggali informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, seperti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir, baik melalui tanggapan, sikap, kritik, keluhan, maupun harapan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat serta bagaimana masyarakat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di kawasan Jalan Perhubungan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang

Respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk tanggapan, penilaian, dan sikap masyarakat terhadap program atau tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik. Respons tersebut dapat berupa dukungan, kritik, keluhan, maupun penyampaian harapan terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Menurut (Ardief, 2023), kebijakan pemerintah dapat menimbulkan berbagai bentuk respons masyarakat, baik berupa dukungan, sikap netral, maupun penolakan, sesuai dengan bagaimana masyarakat menerima dan merasakan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pandangan tersebut, respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir dapat dipahami sebagai penilaian masyarakat setelah melihat dan merasakan secara langsung pelaksanaan kebijakan, baik dari segi proses maupun hasilnya. Selain itu, (Edwin Fransiari et al., 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang jelas, koordinasi antarpihak, serta dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Jalan Perhubungan, Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diperoleh temuan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir cenderung positif, tetapi masih disertai kritik terhadap pelaksanaannya. Bentuk dukungan masyarakat terlihat dari penerimaan terhadap pembangunan dan perbaikan saluran air atau parit yang dilakukan pemerintah. Ibu Ani, Bapak Tambunan, Ibu Tria, Bapak Agus, Ibu Julia, Bapak Rudi, dan Bapak Hasbi pada dasarnya mendukung upaya tersebut karena dinilai dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi genangan ketika hujan turun. Namun, Bapak Rudi dan Bapak Hasbi menegaskan bahwa dukungan masyarakat harus diikuti dengan tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar program atau janji. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan secara langsung.

Meskipun demikian, dukungan tersebut juga disertai kritik terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur. Bapak Tambunan menyampaikan bahwa pembangunan parit sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa bagian sehingga perlu ditingkatkan. Ibu Tria dan Ibu Julia juga menjelaskan bahwa bagian jalan yang sudah diperbaiki atau ditinggikan mengalami sedikit pengurangan banjir, sedangkan bagian lainnya masih sering tergenang. Sementara itu, Bapak Hasbi menilai bahwa penanganan banjir belum merata karena masih terdapat beberapa titik yang kurang mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mengharapkan adanya pembangunan, tetapi juga menginginkan pemerataan penanganan sesuai dengan kondisi wilayah yang mengalami banjir.

Selain melalui dukungan dan kritik, respons masyarakat juga terlihat dari penyampaian aspirasi dan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes), kemudian mengusulkannya dalam Musrenbang Kecamatan untuk diteruskan kepada pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR. Hal ini berkaitan dengan kewenangan penanganan infrastruktur jalan besar yang berada pada pemerintah kabupaten. Pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan gotong royong setiap hari Jumat untuk membersihkan lingkungan, terutama di sekitar saluran air dan sungai. Namun, pelaksanaannya

masih menghadapi kendala karena keterlibatan masyarakat belum maksimal. Masih terdapat warga yang hanya melihat tanpa ikut membantu membersihkan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi telah dilakukan melalui jalur pemerintahan, tetapi pelaksanaan kegiatan kebersihan masih membutuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan kondisi infrastruktur saluran air, kebersihan lingkungan, dan kepercayaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Tria, Ibu Ani, Bapak Agus, dan Ibu Julia menilai bahwa ukuran parit masih terlalu kecil dan jumlah saluran air belum mencukupi sehingga aliran air kurang lancar ketika hujan deras. Bapak Rudi juga menekankan bahwa sampah yang kegiatan gotong royong telah dilakukan. Di sisi lain, Bapak Tambunan menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat. Hal ini sejalan dengan (Edwin Fransiari et al., 2021) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan banjir dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, kondisi infrastruktur dan lingkungan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kebijakan penanganan banjir.

Dilihat dari perubahan kondisi banjir setelah adanya penanganan pemerintah, hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat belum sepenuhnya merata. Bapak Tambunan menilai bahwa kebijakan pemerintah sudah memberikan hasil, sedangkan Ibu Tria dan Ibu Julia merasakan adanya pengurangan genangan pada bagian jalan yang telah diperbaiki atau ditinggikan. Namun, Ibu Ani, Bapak Agus, Bapak Rudi, dan Bapak Hasbi menyampaikan bahwa banjir masih terjadi ketika hujan deras atau berlangsung dalam waktu lama. Sementara itu, Sekretaris Desa belum dapat memastikan perubahan kondisi banjir secara keseluruhan karena penanganan infrastruktur jalan besar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan memberikan perubahan pada beberapa titik, tetapi belum mampu mengatasi permasalahan banjir secara menyeluruh di Jalan Perhubungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR lebih memperhatikan wilayah yang masih sering mengalami banjir dengan memperbaiki parit yang rusak, memperbesar dan menambah saluran air, serta memastikan seluruh saluran dapat terhubung dengan baik. Masyarakat juga mengharapkan adanya pembersihan dan perawatan saluran air secara rutin agar tidak terjadi penyumbatan. Sekretaris Desa berharap agar usulan yang telah disampaikan melalui Musdes dan Musrenbang dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan dan mengikuti kegiatan gotong royong. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir, tetapi masih mengharapkan perbaikan dari segi pemerataan pembangunan, kualitas infrastruktur, dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat agar penanganan banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Banjir yang Telah Diterapkan oleh Pemerintah di Jalan Perhubungan Laut Dendang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jalan Perhubungan, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir. Faktor pertama dibuang sembarangan dapat menyebabkan saluran air tersumbat. Sementara

itu, Sekretaris Desa menyampaikan bahwa sampah masih sering ditemukan di sekitar sungai meskipun adalah efektivitas kebijakan pemerintah. Efektivitas kebijakan menjadi salah satu faktor utama karena masyarakat cenderung mendukung kebijakan apabila program yang dilaksanakan benar-benar memberikan hasil dan manfaat dalam mengurangi banjir. Sebaliknya, masyarakat akan memberikan kritik atau kurang mendukung apabila kebijakan hanya berupa janji tanpa disertai tindakan nyata di lapangan.

Faktor kedua adalah kondisi dan ketersediaan infrastruktur saluran air. Kondisi parit dan saluran air sangat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menangani banjir. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa jumlah parit masih belum mencukupi, ukuran saluran air masih terlalu kecil, dan terdapat saluran yang belum terhubung dengan baik. Kondisi tersebut menyebabkan air mudah meluap ketika hujan deras. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah melakukan perbaikan, penambahan, serta pemeliharaan saluran air agar dapat berfungsi secara maksimal.

Faktor ketiga adalah pemerataan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat mendukung pembangunan parit dan perbaikan saluran air yang telah dilakukan pemerintah, tetapi berharap penanganan banjir tidak hanya dilakukan di beberapa lokasi saja. Hal ini disebabkan masih terdapat titik-titik tertentu di sepanjang Jalan Perhubungan yang sering mengalami genangan ketika hujan turun. Dengan demikian, pemerataan pembangunan menjadi hal penting agar seluruh wilayah yang rawan banjir mendapatkan perhatian dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Faktor keempat adalah pengalaman masyarakat terhadap dampak banjir. Pengalaman masyarakat ketika menghadapi banjir turut memengaruhi respons mereka terhadap kebijakan pemerintah. Banjir yang mengganggu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari membuat masyarakat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap permasalahan tersebut. Masyarakat yang masih merasakan dampak banjir meskipun telah dilakukan pembangunan parit cenderung mengharapkan hasil penanganan yang lebih nyata dan maksimal.

Faktor kelima adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting karena keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, masih ditemukan sampah di sekitar sungai dan sepanjang jalan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Kurangnya kesadaran tersebut dapat menyebabkan saluran air tersumbat dan menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi banjir.

Faktor keenam adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memengaruhi tingkat dukungan yang diberikan terhadap kebijakan penanganan banjir. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mendukung kebijakan apabila dilaksanakan secara bertanggung jawab dan benar-benar memperhatikan kepentingan warga. Selain itu, masyarakat juga berharap penggunaan dana pemerintah dilakukan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Apabila pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah.

Faktor ketujuh adalah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Koordinasi yang baik diperlukan agar permasalahan dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa berperan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes), kemudian mengusulkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk diteruskan kepada pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dengan adanya komunikasi dan koordinasi tersebut, diharapkan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sehingga penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang dipengaruhi oleh tujuh faktor utama, yaitu efektivitas kebijakan pemerintah, kondisi infrastruktur saluran air, pemerataan pelaksanaan kebijakan, pengalaman masyarakat terhadap dampak banjir, kesadaran menjaga lingkungan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Ketujuh faktor tersebut saling berkaitan dalam membentuk dukungan, kritik, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan yang telah diterapkan pemerintah.

3. Penilaian Masyarakat terhadap Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan narasumber, masyarakat menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di kawasan Jalan Perhubungan Laut Dendang sudah mulai dilakukan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari adanya beberapa upaya pemerintah, seperti pembangunan dan perbaikan saluran drainase, penyampaian aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan Musrenbang, serta kegiatan pembersihan lingkungan. Meskipun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi permasalahan banjir karena genangan air masih terjadi di beberapa titik, terutama ketika hujan turun dengan intensitas tinggi atau dalam waktu yang cukup lama.

Dari hasil wawancara, Sekretaris Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa untuk diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal ini dilakukan karena penanganan infrastruktur jalan utama di kawasan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, pemerintah desa berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sedangkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu melibatkan pihak yang memiliki kewenangan.

Penilaian masyarakat terhadap kebijakan tersebut juga terlihat dari tanggapan beberapa narasumber. Ibu Ani, Bapak Tambunan, Ibu Tria Anggun, dan Ibu Julia pada dasarnya menyambut baik adanya pembangunan maupun perbaikan parit. Namun, mereka menilai bahwa perbaikan tersebut masih perlu dilanjutkan karena belum semua titik yang rawan banjir mendapatkan penanganan secara maksimal. Beberapa masyarakat merasakan adanya sedikit perubahan setelah dilakukan peninggian jalan atau perbaikan saluran air, tetapi di bagian lain genangan masih sering terjadi ketika hujan deras.

Sementara itu, Bapak Agus, Bapak Rudi, dan Bapak Hasbi juga menyampaikan bahwa penanganan yang sudah dilakukan memberikan sedikit perubahan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan banjir. Menurut mereka, kondisi saluran air perlu lebih diperhatikan, baik dari segi ukuran, kelancaran aliran, maupun kebersihannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai efektivitas kebijakan dari adanya pembangunan fisik, tetapi juga dari hasil yang dirasakan secara langsung setelah pembangunan tersebut dilakukan.

Selain pembangunan drainase, keterlibatan masyarakat juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi keberhasilan penanganan banjir. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, kegiatan pembersihan lingkungan yang dilaksanakan setiap hari Jumat belum diikuti oleh seluruh masyarakat. Masih terdapat warga yang kurang aktif dalam kegiatan tersebut. Padahal, kebersihan saluran air membutuhkan perhatian bersama agar tidak terjadi penyumbatan akibat sampah maupun endapan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu didukung dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Simanjuntak, 2026) yang membahas partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. Penelitian tersebut menjelaskan

bahwa upaya pemerintah dilakukan melalui pengorekan saluran drainase, kegiatan gotong royong, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Namun, efektivitas penanganannya juga dipengaruhi oleh kesadaran serta konsistensi masyarakat dalam menjaga saluran drainase. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi di Jalan Perhubungan Laut Dendang, yaitu penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh (Dharmayasa, 2026) dalam penelitian mengenai evaluasi kinerja dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem drainase di kawasan rawan banjir Jalan Plawa, Kabupaten Jembrana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi drainase dapat berbeda antara satu bagian wilayah dengan bagian lainnya. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya drainase belum tentu diikuti dengan kepedulian dan keterlibatan dalam pemeliharaannya. Hasil penelitian ini memperkuat temuan di Jalan Perhubungan Laut Dendang bahwa perbaikan saluran perlu dilakukan secara merata dan disertai pemeliharaan secara rutin.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan didukung oleh penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut karena masih terdapat genangan di beberapa titik meskipun pembangunan dan perbaikan drainase telah dilakukan. Ke depannya, masyarakat mengharapkan adanya penambahan dan perbaikan saluran drainase, pemeriksaan serta pembersihan saluran secara rutin, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari terlaksananya pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi banjir dan memberikan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan banjir di Jalan Perhubungan, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya memberikan respons positif terhadap upaya pemerintah dalam menangani banjir, terutama melalui pembangunan dan perbaikan saluran drainase serta penyampaian aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa dan Musrenbang. Namun, dukungan tersebut masih disertai kritik karena penanganan banjir belum merata dan masih terdapat beberapa titik yang mengalami genangan ketika hujan deras.

Faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat meliputi efektivitas kebijakan pemerintah, kondisi infrastruktur saluran air, pemerataan pembangunan, pengalaman masyarakat terhadap dampak banjir, kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dan kerja sama antarpihak.

Sementara itu, berdasarkan penilaian masyarakat, kebijakan pemerintah dalam menangani banjir di Jalan Perhubungan Laut Dendang sudah mulai memberikan perubahan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih terjadinya genangan di beberapa titik meskipun perbaikan saluran air dan peninggian jalan telah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa pemerataan pembangunan drainase, penambahan dan perbaikan saluran air, serta pembersihan dan pemeliharaan secara rutin. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten juga perlu meningkatkan koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, penanganan banjir

di Jalan Perhubungan Laut Dendang diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, A., Nasution, D. A., Siregar, D. M., & Aini, N. (2025). Mitigasi dan Dampak Sosial Banjir di Kota Medan: Kajian Terpadu terhadap Faktor Penyebab, Respons Masyarakat, dan Peran Pemerintah Daerah. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 11*(2), 410–420. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.7344

Anugrah, A. R. S. (2023). Analisis Peran Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kota Pontianak: Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor. *Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 11*(2), 163–171. https://doi.org/10.31289/publika.v11i2.10504

Ardief, I. (2023). Stimulus dan Respons terkait Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, 2*(1), 48–56. https://doi.org/10.32734/ljsp.v2i1.11400

Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 2*(3), 317–332. https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332

Arisanty, D., Hastuti, K. P., & Putro, H. P. N. (2022). *Desa Tangguh Bencana Banjir: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai Kearifan Lokal Banjar*. CV Jendela Hasanah.

Darman, A. A. E. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin sebagai Syarat Berpergian ke Tempat-Tempat Publik pada Masa Pandemi. *Jurnal Analis Kebijakan, 5*(2), 110–128. https://doi.org/10.37145/yp5w1q10

Dharmayasa, I. G. N. P., Sujana, A. E., Suryanti, I., & Nuraga, I. K. (2026). Evaluasi Kinerja dan Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Sistem Drainase di Kawasan Rawan Banjir Jalan Plawa, Kelurahan Baler Bale Agung, Jembrana, Bali. *Jurnal Teknik Sipil Institut Teknologi Padang, 13*(2), 144–154. https://doi.org/10.21063/jts.2026.V1302.0144-154

Fransiari, M. E., Warouw, S. P., & Brahmana, N. E. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Masyarakat Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, 11*(2), 201–211. https://doi.org/10.52643/jbik.v11i2.1250

Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.

Istyanto, F., & Maghfiroh, A. (2021). Peran Mikronutrisi sebagai Upaya dalam Pencegahan COVID-19. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 11*(1), 99–110. https://doi.org/10.32583/pskm.v11i1.1065

Karlina, L., & Ismanto, M. (2017). Enggan Mengungsi, Lebih Baik di Rumah Sendiri: Keberadaan Plenggrongan sebagai Bentuk Respons Kultural Masyarakat Desa Sitiarjo dalam Menghadapi Bencana Banjir Bandang. In *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan ke-4* (pp. 133–150).

Pramumardani, E. V., Bachtiar, A., & Arvianto, A. (2024). Membangun Indeks Komposit dalam Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan SNI Wajib: Literature Review. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, 19*(1), 46–57. https://doi.org/10.14710/jati.19.1.46-57

Putri, S. P., Yahya, W., & Hidayah, U. (2024). Kajian Respons Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dan Rob di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan, 22*(1), 1–13. https://doi.org/10.54911/litbang.v22i1.292

Rizqiani, A. P., Meisya, R., Khoeriah, S., & Septiadi, M. A. (2025). Persepsi Masyarakat terhadap Respons Pemerintah dalam Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Baleendah. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota,*

2(2), 77–90. https://doi.org/10.33751/jekota.v2i2.108

Ruchban, A. L., Darwis, R. S., & Wibowo, H. (2024). Elemen Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 15*(1), 79–88. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.9276

Selvia, F., & Angela, V. F. (2024). Model Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) dalam Penanganan Banjir di Desa Keruing, Katingan. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7*(2), 75–84. https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2735

Setiadi, S., Sumaryana, A., Bekti, H., & Sukarno, D. (2023). Public Policy Communication for Flood Management. *The Journal of Society and Media, 7*(2), 300–312. https://doi.org/10.26740/jsm.v7n2.p300-312

Setiawan, Y. A., & Nugara. (2022). Kebijakan Transformatif Penanganan Risiko Banjir dan Rob di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, 6*(1), 72–87. https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv6i01.5

Simanjuntak, G. G., Tobing, A., Pasaribu, J., & Rajagukguk, J. (2026). Partisipasi Masyarakat terhadap Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pendangkalan Saluran Drainase di Kelurahan Besar. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 13*(4), 223–230. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i4.827

Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research, 5*(3), 110–116. https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238

Suneth, R. A., Waani, J. O., & Tungka, A. E. (2020). Respon Masyarakat di Kawasan Permukiman Padat Menurut Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Wenang Kota Manado. *Jurnal Spasial, 7*(3), 361–370. https://doi.org/10.35793/sp.v7i3.32222

Utama, L. N. S., Rachmawati, T. A., & Hadisusanto, N. (2018). Strategi Mitigasi Bencana Banjir Sungai Penguluran di Kecamatan Gedangan dan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9–17.

Yarangga, C. M. W., Purcahyono, J., & Sitorus, Y. L. M. (2023). Penanganan Banjir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Jurnal MEDIAN Arsitektur dan Planologi, 13*(1), 1–9. https://doi.org/10.58839/jmap.v13i1.1225

Yusup, M. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Bekasi. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6*(4). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3608

Zulaeha, M., Ariany, L., Dwifama, A. H., Falmelia, R. A., & Ridhani, M. S. (2022). Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 7*(3), 150–159.